



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FLORENSIUS RONNY
2. Jabatan : KETUA DPRD
3. NHK : 529023

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/160 m2 di KAB / KOTA SINTANG, WARISAN Rp. 3.300.000.000
2. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 250000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 365.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX DOUBLE KABIN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.135.000.000

III. HUTANG Rp. 54.965.854

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.080.034.146



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.